

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Fahmi Lubis. *et.al.* 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta; Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- . 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta; ROV Creative Media.
- Alum Simbolon. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta; Liberty.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Arifin Hutabarat. 1989. *Padamu Negeri: Perjalanan Garuda Indonesia*. Jakarta; Ganesha Press.
- Azizah. 2020. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*. Malang; Inteligensia Media.
- Cut Zahrina. 2010. *Tugu Pesawat Maimun Saleh: Bukti Sejarah Penerbangan di Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Tradisional Banda Aceh.
- Destivano dan Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta; Rajawali Press.
- Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta; Aswaja Pressindo.
- Hasbiyallah dan Moh. Sulhan. 2015. *Hadis Tarbawi*. Bandung; Remaja Rosdakarya. hlm. 269-270
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press.
- Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia : Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU*. Malang; Setara Pers.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Ningrum Natasya Sirait. 2004. *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan; Pustaka Bangsa Pers.
- Nurianto Rachmad Soepadmo. 2020. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo; Zifatama Jawa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Putu Sudarma Sumadi. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*. Sidoarjo; Zifatama.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- . 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Sanusi Bintang dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sugiharto. 2022. *Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI: Filosofi, Formulasi & Implementasi*. Surabaya; Jakad Media Publishing.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung; Refika Aditama.
- Zakiah Daradjat. *et.al*. 1995. *Ilmu Fiqih I*. Yogyakarta; Dhana Bhakti Wakaf.

## **SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI**

Azzahra Sabrina Biyantara. 2021. *Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan KPPU No.15/KPPU-I/2019)*. Skripsi. Universitas Yarsi.

Yudha Sugiawan. 2022. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjatuhkan Sanksi Larangan Mengikuti Tender*. Skripsi. Universitas Hasanuddin

## **JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA**

Amaliyah. *et.al.* 2019. *Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *Amanna Gappa*. Volume 27 Nomor 1.

Ayu Diah Rahmani dan Rianda Dirkareshza. 2023. *Tanggung Jawab Lion Air Group Terhadap Praktik Diskriminasi Kapasitas Kargo berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Perkara Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-I/2020)*. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Volume 5 Nomor 1.

Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam*. *Jurnal Mercatoria*. Volume 9 Nomor 1. Juni.

Fransiska Lestari Simanjuntak, Ahmadi Miru dan Mustafa Bola. 2018. *Penegakan Hukum oleh Hakim Agung Republik Indonesia dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan KPPU yang Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*. *Madani Legal Review*. Volume 2 Nomor 1.

Marina Ramadhani, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, dan Adelina Fitri. 2021. *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.)*. *Jurnal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*. Volume 1 Nomor 2. November.

Siti Bianca Zahara dan Heru Pringgodani Sanusi. 2021. *Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kargo*. Reformasi Hukum Trisakti. Volume 3 Nomor 3.

Sri Istiawati. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha. Volume 6 Nomor 1.

Triandi dan Ivana Christine. 2022. *Analisis Kinerja dan Posisi Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk Berdasarkan Indikator Rasio Keuangan, Tingkat Kesehatan dan Prediksi Keuangan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Volume 10 Nomor 2. Juli.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / PUTUSAN PENGADILAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst.

Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.

Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020.

## **SUMBER ARTIKEL DAN INTERNET**

CNN Indonesia. 2021. *Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M.* 20 Desember 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>

Garuda Indonesia. 2021. *Tentang Garuda Indonesia*. 7 Juni 2024.  
<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index>

KPPU. 2021. *KPPU Putuskan Lion Air Telah Lakukan Praktek Diskriminasi dalam Penjualan Kapasitas Kargo Barang*. 18 Mei 2024.  
<https://kppu.go.id/blog/2021/03/kppu-putuskan-lion-air-telah-lakukan-praktek-diskriminasi-dalam-penjualan-kapasitas-kargo-barang/>

KPPU. 2022. *Mahkamah Agung Kuatkan Putusan KPPU Atas Perkara Umrah yang Melibatkan Garuda Indonesia*. 20 Desember 2022.  
<https://kppu.go.id/blog/2022/03/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-yang-melibatkan-garuda-indonesia/>

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
  - c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
  - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

Lampiran 2: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
  - b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
  - c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa . . .

Lampiran 3: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 3 TAHUN 2011



**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PASAL 19 HURUF D (PRAKTEK DISKRIMINASI) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep/I/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2011-Desember 2011;